

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah pembinaan anak bangsa. Semua warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan yang berdasarkan pada prinsip demokrasi Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip (1) persamaan; (2) keseimbangan antara hak dan kewajiban; (3) kebebasan yang bertanggung jawab; (4) kebebasan berkumpul dan berserikat; (5) kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat; (6) kemanusiaan dan keadilan sosial; (7) cita-cita pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Supaya lebih jelas, sebelum menguraikan teori pendidikan dan pengajaran kaitannya dengan pengembangan pendidikan, alangkah baiknya kita lihat kembali undang-undang sistem pendidikan nasional Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 yang menguraikan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan pendidikan pada umumnya. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan unsur-unsur pendidikan yaitu; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Kualitas sebuah negara dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang dipersiapkan untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas suatu negara. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya alam tidak dapat terpisah dari pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan.

Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan melalui tahapan perencanaan, pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan.² Semua tahapan itu harus dilewati dengan lengkap dan sempurna agar hasil yang diharapkan dari pengelolaan pembiayaan pendidikan bisa dirasakan dampak positifnya oleh madrasah. Biaya

¹Hasan Basri & Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 35-36.

²Ulpha Lisni Azhari & Dedy Achmad Kurniady, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah." *Administrasi Pendidikan*, XXII (2016) hlm., 27.

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya.³

Pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana berarti jumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia, serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berapa besar uang yang harus dibelanjakan, darimana sumber uang diperoleh dan kepada siapa uang harus dialokasikan.⁴

Pembiayaan merupakan jantung dari pergerakan praktik pendidikan di manapun berada. Arah perkembangan dari hal itu adalah relevansi akademis, atmosfer akademik yang baik, institusional

³ Ainul Mardiyah Usman, et. Al, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh." *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan*, 4 (November, 2017) hlm., 236.

⁴ Imam Machali & Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 195-196.

manajemen, filosofis, efisiensi dan inovasi. Manajemen atau pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah menurut Permana “merupakan proses perencanaan, penggalian sumber, penyusunan anggaran, dan penggunaan serta pelaporan keuangan di tingkat sekolah atau madrasah’.

Manajemen keuangan menurut *Commonwealth of Learning and The Southern African Development Community Ministries of Education. Covers such areas as the procurement of funds, their allocation, monitoring their use in the interest of accountability and producing financial reports for the relevant stakeholders.* Di dalam manajemen pembiayaan pendidikan terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah. Manajemen pembiayaan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan pembiayaan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dalam menyusun RAPBS, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Setelah tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, kepala sekolah menyetujui. Pelibatan para guru dan pengurus komite sekolah ini akan diperoleh rencana yang mantap dan secara moral semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite sekolah merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut.

Proses penggunaan atau pembelajaran biaya menurut Prihatin merupakan kegiatan yang menyangkut proses dan prosedur penggunaan

biaya sesuai dengan rencana yang telah di tentukan. Sisi lain dari pembiayaan pendidikan adalah alokasi, untuk hal ini pembiayaan dalam dua jenis yaitu pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung.⁵

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka pembentukan potensi sumberdaya manusia (SDM), penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil guna. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program.

Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang esensial demi terciptanya situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4, ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu pendidikan di selenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.⁶ Kata kunci tidak diskriminatif disini berlaku untuk pembiayaan pendidikan,

⁵ Muhajirin, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Partisipasi Masyarakat." *Educational Management*, 2 (Juni, 2012) hlm., 171.

⁶ Ferdi W. P, Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis." *Pendidikan dan Kebudayaan*, 4 (Desember, 2013), hlm., 566.

artinya bahwa pembiayaan pendidikan haruslah tidak mendiskriminatifkan setiap warga negara yang memiliki keinginan untuk dapat mengikuti pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dirinya.

Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, pembiayaan sebagai faktor pendukung. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber-sumber dananya tetapi juga penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Disampaikan pula oleh Akbar mengenai efisiensi menyatakan bahwa efektivitas pendidikan menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan jumlah yang ditargetkan. Maka masalah efektivitas biaya pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan upaya untuk mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat menghasilkan pendidikan yang telah ditentukan.⁷ Sesuatu disebut efektif apabila sesuatu itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Strategi pembiayaan yang dapat diterapkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, harus memfokuskan pada program-program yang menjadi objek biaya, supaya efektifitas dan efisiensi pembiayaan

⁷ Budi Budaya, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Dasar yang Efektif." *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 1 (t.t), hlm., 42-45.

pendidikan dapat tercapai. Dalam hal ini, kemampuan pengelolaan pembiayaan sekolah dalam menentukan strategi menjadi faktor penting.⁸

Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun-tahun dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program. Dalam meningkatkan mutu sekolah juga dibutuhkan SDM yang mampu mengelola dana dan menentukan strategi pembiayaan dari strategi perencanaan sampai strategi tindak lanjut pembiayaan.

Pengelolaan biaya pendidikan memiliki tiga dimensi, dimana setiap dimensi tersebut memiliki satu indikator, yaitu perencanaan keuangan dengan indikator ketetapan dalam alokasi penerimaan dan pengeluaran, pelaksanaan dengan indikator kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan evaluasi dengan indikator adanya tindakan korektif terhadap pelaksanaan pembiayaan.⁹

Biaya yang harus dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirectcost*). Penghitungan biaya pendidikan ditentukan oleh komponen kegiatan dan biaya satuan meliputi gaji guru (seperti gaji pokok, tunjangan fungsional, insentif, honorarium menguji dan membuat soal, dan

⁸ Ririn Tius Eka Margareta & Bambang Ismanto, "Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri." *Manajemen Pendidikan*, 2 (Juli-Desember, 2017) hlm., 198.

⁹ Siti Saniyyah Sholihat, "Pengelolaan Biaya Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, dan Mutu Layanan Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Swasta." *Administrasi Pendidikan*, 1 (April, 2017), hlm., 5-6.

penghasilan lainnya yang sah), sarana dan prasarana (seperti ruang belajar, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang kantor, tempat ibadah, dan sebagainya), dan dukungan PBM (seperti buku paket, media pendidikan, bahan dan alat laboratorium, slide film, overhead projector, komputer, papan tulis, alat tulis, dan sebagainya), pembiayaan mencakup pengadaan dan pemeliharaan. Secara umum pengeluaran biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, perseorangan, lembaga di masyarakat, dan bantuan luar negeri.

Jika pembiayaan pendidikan tidak terpenuhi paling tidak sesuai kebutuhan minimal maka secara nasional akan ditemukan dampak berupa terjadinya erosi kualitas sehingga kontribusinya terhadap pembangunan rendah. Pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan secara efektif menunjuk pada suatu rasio antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang dapat dibandingkan minimal sama. Efisiensi biaya memberikan penekanan pada alokasi anggaran atau penggunaan dana terhadap kegiatan proses belajar mengajar (PBM) secara langsung. Setiap sekolah awal tahun anggaran sudah menentukan rencana penggunaan biaya sesuai kebutuhan riil sekolah berorientasi pencapaian.¹⁰

Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan sistem yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan, keuangan (fiscal), serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan. Ada dua bagian dalam

¹⁰ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 140-141.

penganggaran yaitu perkiraan dan pengeluaran. Perkiraan dan penyajian pendapatan harus dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat direalisasikan.

Fasli Djalal, staf ahli Mendiknas mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga pengertian tentang anggaran pendidikan. Pertama, anggaran untuk sektor pendidikan. Selain untuk anggaran pendidikan masyarakat umum, dalam pengertian ini juga termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen lain selain Depdiknas. Kedua, anggaran Depdiknas yaitu anggaran pendidikan nasional yakni semua anggaran pembangunan. Ketiga, anggaran pendidikan nasional, yakni semua anggaran pendidikan di semua departemen.¹¹ Dapat dikatakan anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah untuk jangka waktu tertentu (periode), serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian aktivitas.

Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan di dalam madrasah. Untuk itu, setiap penanggung jawab program harus menjalankan aktivitas sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Karena anggaran memiliki kedudukan penting, seorang penanggung jawab program harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan.¹²

¹¹ Armida, "Sistem Anggaran Pendidikan." *Penelitian Pendidikan*, 2 (Oktober, 2012) hlm., 5.

¹² Muhimin, et. Al, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 357.

Untuk menelusuri distribusi dana yang dianggarkan itu tentunya dibutuhkan informasi biaya pendidikan yang akurat melalui analisis pembiayaan pendidikan nasional secara keseluruhan. Analisis pembiayaan ini sangat penting karena besar kecilnya biaya pendidikan sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa dan profesionalisme guru.

Kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan dapat membawa dampak positif pada pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.”¹³ Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan pendidikan, proses penganalisaannya dilakukan dengan melihat keterhubungan hasil yang diperoleh antara input dan output dari keseluruhan proses pendidikan.¹⁴

Kemampuan dana sekolah sangat memengaruhi kuantitas dan kualitas program kerja sekolah. Program kerja menyesuaikan diri dengan ketersediaan dana sekolah. Idealnya, sekolah mampu menyediakan dana untuk program kerja rutin dan pengembangan terkait delapan standar pendidikan. Maka, sekolah selalu meningkatkan mutunya setiap tahun karena program kerja yang terarah dan terukur sesuai kebutuhan standar mutu nasional pendidikan.¹⁵

¹³ Yoto, “Analisis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.” *Jurnal Teknik Mesin*, 1 (April, 2012) hlm., 79.

¹⁴ Dedy Achmad Kurniady, “Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung.” *Penelitian Pendidikan*, 1 (April, 2011) hlm., 42.

¹⁵ Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 221.

Sekolah yang tidak mampu mengelola anggaran dan pembiayaan akan menjadi penghambat untuk kelangsungan kegiatan madrasah. Pentingnya anggaran perlu diterapkan agar permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dapat diatasi dan segera dibenahi. Apalagi anggaran telah tepat sasaran, maka pendistribusian akan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Adanya keterbatasan sumber-sumber daya dalam ekonomi pendidikan maka diperlukan usaha sistematis dalam pembiayaan pendidikan melalui penganggaran. Hemat dalam pembelanjaan serta bijak dalam pengeluaran akan membantu menunjang kualitas sekolah menjadi lebih baik. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan di sekolah akan dapat mencapai ranah yang telah direncanakan sebelumnya.

Di MTsN 2 Pamekasan pembiayaan pendidikannya telah berjalan efektif sesuai rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Anggaran yang dirumuskan harus sesuai dengan rencana tahunan yang memuat RAPBS. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBS adalah harus adanya pemenuhan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sekolah/madrasah setiap tahunnya. RAPBS ini pun dituntut mencakup semua anggaran kegiatan rutin dan biaya penting lainnya, agar kesemuanya itu dapat dilaksanakan satu tahun.

Di MTsN 2 Pamekasan, dana yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup dalam kegiatan untuk pengembangan sekolah itu sendiri. Namun demikian dana untuk keperluan pengembangan sekolah dapat disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah di programkan

sekolah dalam satu tahun pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula. Berapa besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa kelas I, II dan III di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah sangat beragam. Jumlah siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, SHPS pada masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipun demikian sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS minimal agar suatu mutu pendidikan tertentu dapat dicapai secara nasional.¹⁶

Sejauh ini, dapat dilihat bahwa seluruh anggaran yang dirumuskan telah berjalan optimal dan sesuai dengan rencana awal. Bukti nyata bahwa dari pengelolaan anggaran yang telah berjalan efektif dan efisien adalah dengan berkembangnya sekolah tersebut ke arah yang lebih baik. Telah banyak manfaat yang diperoleh saat mengoptimalkan pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan anggaran, diantaranya: Peningkatan mutu belajar guru, kelancaran layanan belajar mengajar, layanan keseharian guru terhadap siswa, kenyamanan dan kepuasan siswa diruang kelas, ketersediaan fasilitas belajarkan lebih memadai, kesempatan siswa menggunakan berbagai fasilitas sekolah lebih terbuka, mengutamakan pengelolaan dan layanan siswa, tersedianya sarana dan prasarana sekolah

¹⁶Ahmad Agus Dewi Muhajir, Administrator. MTsN 2 Pamekasan, wawancara langsung (13 Oktober 2019)

yang lebih lengkap, serta program madrasah akan berjalan sesuai rencana madrasah.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba melakukan penelitian tentang “Optimalisasi Pembiayaan Pendidikan melalui Pengelolaan Anggaran Madrasah di MTsN 2 Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang di paparkan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi kepala madrasah dalam mengoptimalkan pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan anggaran madrasah di MTsN 2 Pamekasan?
2. Apa saja faktor pendukung dalam optimalisasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan anggaran madrasah di MTsN 2 Pamekasan?
3. Apa saja faktor penghambat dalam optimalisasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan anggaran madrasah di MTsN 2 Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi kepala madrasah dalam optimalisasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan anggaran madrasah di MTsN2 Pamekasan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam optimalisasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan anggaran madrasah di MTsN 2 Pamekasan
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam optimalisasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan anggaran madrasah di MTsN 2 Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1) kegunaan secara teoritis, 2) kegunaan secara praktis.

Kegunaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi mengenai optimalisasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan anggaran madrasah di MTsN 2 Pamekasan. Seluruh pembahasan yang ada di dalamnya mampu memberikan tambahan wawasan pengetahuan yang dapat mempermudah dalam memperoleh informasi terkait.

a. Bagi Peneliti

Penelitian tentang optimalisasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan anggaran sekolah di MTsN 2 Pamekasan dapat dijadikan bahan kajian dan wawasan dalam dunia pendidikan serta bisa menjadi petunjuk atau inspirasi di masa depan untuk menjadi tenaga kependidikan yang profesional.

b. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai temuan ilmiah, perbandingan, pedoman bahan referensi, dan masukan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan temuan penelitian terkait optimalisasi pembiayaan pendidikan melalui pengelolaan anggaran sekolah di MTs Negeri 2 Pamekasan.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Bagi Sekolah MTs Negeri 2 Pamekasan

1) Bagi Kepala Madrasah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kepala MTs Negeri 2 Pamekasan sebagaimana berikut: 1) Sebagai kontribusi pemikiran yang bersifat membangun segala konsep-konsep yang ada (konstruktif), sehingga dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan dan pengembangan pendidikan; 2) Sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas sekolah; 3) Sebagai

salah satu bahan solusi terhadap permasalahan pembiayaan pendidikan khususnya dalam pengelolaan anggaran yang nantinya akan menunjang kemajuan dan perkembangan sekolah.

2) Bagi Kepala Tata Usaha

Penelitian ini dapat digunakan oleh Kepala TU atau sebagai PPK dalam pengelolaan pembiayaan dan anggaran untuk lebih profesional dalam mengalokasikan dana anggaran. Perannya sebagai PPK juga seharusnya mampu menjadi panutan dalam menyetujui dan memilih mana yang perlu dianggarkan dan kegiatan apa saja yang perlu diolah lebih lanjut untuk disepakati bersama.

3) Bagi Bendahara

Penelitian ini dapat digunakan oleh bendahara dalam pengelolaan pembiayaan dan anggaran untuk lebih rinci dan rapi dalam mencatat pengeluaran karena ini berkaitan dengan keuangan agar mudah dibaca dan dipahami. Jika penulisannya sulit dipahami maka akan menimbulkan masalah ketika nanti dicatat dalam komputer. Dengan pencatatan yang rapi sekalipun belum tercatat di komputer, mana akan mudah dalam proses penyalin data dan memaksimalkan kinerja agar tidak terhambat lantaran catatan yang kurang tersusun rapi.

4) Bagi Operator

Penelitian ini dapat digunakan oleh operator dalam pengelolaan pembiayaan dan anggaran untuk bisa bekerja lebih cepat dalam melayani data yang dibutuhkan, perlu lebih tekun dan teliti serta mampu menghadapi kendala yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu jalannya proses pembiayaan dengan anggaran.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini dimaksudkan agar memperoleh kesamaan pemahaman antara penulis dengan pembaca terhadap istilah yang dimaksudkan yaitu:

1. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.

Pembiayaan pendidikan dalam penelitian ini adalah aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah direncanakan dan ditetapkan yang dilakukan di MTs Negeri 2 Pamekasan

3. Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.
4. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang.

Pengelolaan anggaran dalam penelitian ini adalah pengelolaan dalam penyusunan anggaran satuan uang yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan di MTs Negeri 2 Pamekasan.

Berdasarkan definisi istilah di atas, maka maksud dari judul penelitian ini adalah pembiayaan pendidikan yang ada di suatu lembaga bisa berjalan dengan optimal melalui pengelolaan anggaran guna memenuhi kebutuhan sekolah dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan pendidikan di lembaga yang dipimpinnya.

